

EVALUASI KONTEKS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

¹⁾Lukman, ²⁾Akmal Ibrahim, ³⁾Nur Indrayati Nur Indar, ⁴⁾Muh. Tang Abdullah

¹⁾Universitas Hasanuddin

²⁾Universitas Hasanuddin

³⁾Universitas Hasanuddin

⁴⁾Universitas Hasanuddin

¹⁾ lukmansirap75@gmail.com, ²⁾Muhakibuh62@gmail.com, ³⁾indrayatinurunhas@gmail.com,

⁴⁾tang.abdullah@unhas.ac.id

Abstrak

Sebagai bentuk penanggulangan masalah persampahan, Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki Peraturan Daerah No.7 LD.2016/TLD.2016/NO.49 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir serta dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat secara proporsional, efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konteks kebijakan yang ditinjau dari evaluasi kebijakan program pengelolaan sampah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Metode penelitian dilakukan dengan teknik pengumpulan data, observasi, dan wawancara pada beberapa informan. Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman, yaitu Reduksi data, Display data, dan Penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kebijakan tidak efektif atau tercapai karena kurangnya perhatian dan kontrol dari lembaga yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, TPS dan TPA yang kurang menyebabkan makin maraknya tindakan pembuangan sampah secara sembarangan, waktu operasional pembuangan sampah yang ditetapkan sering mengalami keterlambatan dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, keberadaan bank sampah yang semakin kurang, serta kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang masih sangat rendah.

Kata Kunci: Evaluasi, Konteks kebijakan, Pengelolaan sampah

Abstract

As a form of overcoming the problem of wastes, Sidenreng Rappang Regency had a Regional Regulation No.7 LD.2016/TLD.2016/NO.49 about Waste Management, which states that in order to improve the public health, realize a clean and healthy environmental, it's necessary to carry out management in an integrated and comprehensive manner from upstream to downstream. than in the context of comprehensive and integrated waste management, it's necessary to need the participation of the community with a proportional, effective and efficient manner. The purpose of this research is to determine the policy context of terms the policy evaluation of the waste management program in Sidenreng Rappang Regency. The method of research was carried out with data collection techniques, observations, and interviews with several informants. The type is descriptive qualitative using Miles and Huberman analysis techniques, that is namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the policy of program was not effective or was achieved due to lack of attention and control from the institution concerned, lack of socialization to the community, less TPS and TPA causing more indiscriminate disposal of waste, the schedule of operational disposal often experienced delays and had not been good implemented by the community, the existence of a waste bank that is increasingly lacking, and public awareness of waste management is tiny.

Keywords : The Konteks policy of evaluation, Effectiveness, Waste management

A. PENDAHULUAN

Data program lingkungan PBB (UNEP) menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil sampah makanan tertinggi di Asia Tenggara dengan 20,93 ton sampah tiap tahunnya. Sampah merupakan penyebab utama masalah lingkungan dan pemicu terbesar bencana banjir, sehingga apabila tidak ditangani dengan baik maka akan menimbulkan masalah lingkungan dan sosial yang lebih serius. Menyikapi persoalan sampah, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan sampah sebagai bentuk penanggulangan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Presiden RI No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Pemerintah memiliki inisiatif sendiri dalam hal konteks pengelolaan sampah, sehingga masalah sampah dapat terselesaikan dengan baik. Undang-undang No.18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah diselenggarakan atas asas tanggung jawab, berkelanjutan, manfaat, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan, dan nilai ekonomi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Perkembangan jumlah penduduk yang pesat setiap tahunnya berbanding lurus dengan jumlah sampah yang dihasilkan, sehingga pengelola persampahan mengalami banyak tekanan akibat jumlah timbulan sampah yang makin besar, oleh karena itu efektivitas pengelolaan sampah pun harus ikut meningkat. Pengelolaan sampah dari setiap daerah masing-masing memiliki tujuan dalam mengontrol sampah yang dihasilkan oleh penduduknya. Sehingga dalam menanggapi persoalan tersebut dan mendukung peraturan pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengeluarkan Peraturan Daerah No.7 LD.2016/TLD.2016/NO.49 tentang Pengelolaan Sampah, yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, perlu melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif dari hulu ke hilir serta dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu

melibatkan peran serta masyarakat secara proposional, efektif dan efisien.

Meski telah diatur oleh banyak landasan normatif dalam pengelolaannya, upaya tersebut seringkali masih menjadi masalah. Masyarakat yang kurang disiplin dan kurang pengetahuan tentang aturan pengelolaan sampah seringkali masih terlihat membuang sampah sembarangan. Hal tersebut dilakukan karena beberapa alasan, salah satunya adalah beberapa daerah tidak memiliki TPS dan pengangkut sampah yang belum datang saat sampah masyarakat sudah menumpuk sehingga pinggir jalan dan sungai menjadi alternatif tempat pembuangan sampah (ucap salah seorang masyarakat Kab. Sidenreng Rappang). TPA Patommo merupakan satu-satunya tempat pembuangan akhir non regional yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga bisa dikatakan bahwa pihak pemerintah mengalami kendala penampungan dan menyebabkan timbulan sampah masyarakat pun semakin banyak.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan sebelumnya, masalah empiris yang telah diuraikan menjadi hal menarik untuk diuji kebenarannya secara ilmiah dengan melihat konteks kebijakan yang ada. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang”.

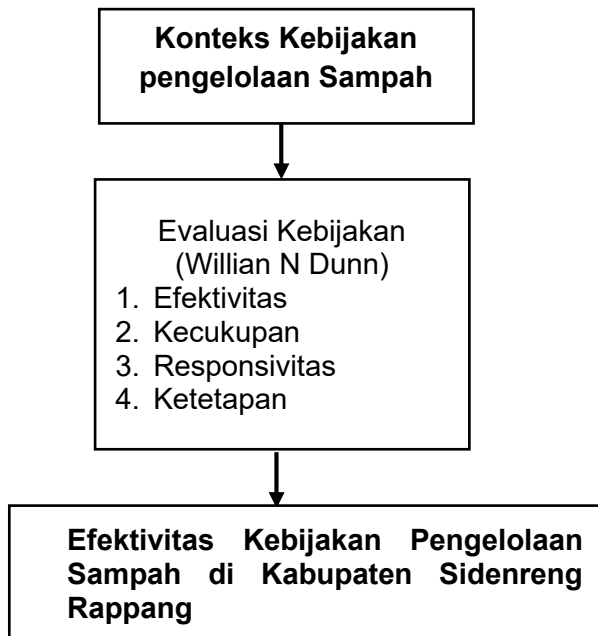
B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran terkait konteks kebijakan dengan mengevaluasi kebijakan tentang pengelolaan sampah yang ada. Adapun informan dalam penelitian ini ialah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang, LSM, Tokoh Masyarakat, dan beberapa masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang ditemui.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi dan wawancara, sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Data yang disajikan dalam penelitian ini berupa data hasil observasi dan wawancara yang kemudian dianalisis dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (2014) berupa Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model kerangka analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan melihat dari sisi evaluasi kebijakan menurut William N Dunn. Adapun model dari kerangka analisis yang digunakan adalah sebagai berikut.



Pengelolaan sampah merupakan sebuah kegiatan yang tersistematis secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan tujuan untuk mengurangi dan menangani masalah persampahan. Sistem pengelolaan sampah dimulai dari sumber timbulan sampah (tempat pewadahan atau rumah masyarakat) sampai pada TPS (Tempat Pengumpulan Sementara) atau dari sumber timbulan langsung ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Pada tahap pembuangan akhir, sampah akan mengalami pemrosesan baik secara fisik, kimia, maupun biologis sedemikian rupa hingga tuntas penyelesaian seluruh proses. Dengan alasan tersebut maka saat ini TPA disebut sebagai tempat pemrosesan terakhir. TPA sering juga disebut Landfill. Landfill ialah tempat pembuangan sampah yang memiliki dasar "impermeable" (tidak tembus air) sehingga sampah yang diletakkan tidak akan merembes hingga mencemari air dan tanah disekitar. Sampah-sampah yang datang diletakkan secara berlapis, dipadatkan dan ditutupi dengan tanah liat untuk mencegah datangnya hama dan bau. Setiap masyarakat diwajibkan untuk melakukan pengelolaan atau memilah

sampah dengan cara atau meode berwawasan lingkungan. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sosialisasi dan pelatihan yang rutin kepada masyarakat, sebab kebijakan pengelolaan sampah akan berhasil da terealisasi secara maksimal atas partisipasi masyarakat. Namun berdasarkan berita yang ada, sosialisasi tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidrap terakhir kali terlaksana pada tahun 2018. Hal tersebut tentu sangat berdampak terhadap pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai tata cara pengelolaan sampah yang baik agar tidak menimbulkan bencana.

1. Efektivitas

Efektifitas yang berasal dari kata efektif memiliki arti dicapainya sebuah tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, selain itu efektivitas berkaitan dengan hubungan timbal balik antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ketidaksiain antara sasaran (tujuan) program yang diharapkan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menimbulkan masalah yang tidak pernah usai. Kebijakan pengelolaan persampahan yang disusun sedemikian rupa dengan maksud menanggulangi masalah sampah yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang justru tidak membuahkan hasil yang maksimal. Waktu penanganan sampah yang tidak efektif, masih banyak sampah yang berserakan di tempat umum, tempat pembuangan sampah ilegal yang kian hari makin marak, banyaknya hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa masalah persampahan yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang belum teratasi menjadi bukti kurang efektifnya kebijakan tentang pengelolaan sampah yang ada.

2. Kecukupan

Kecukupan dalam sebuah kebijakan publik menurut Dunn dimaknai dengan seberapa jauh tingkat efektivitas dalam memuaskan kebutuhan, nilai, dan kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Ketersediaan sarana dan prasarana pun menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang pengelolaan sampah daerah sehingga bisa mewujudkan kecukupan dalam pemuasan kebutuhan program. Akan tetapi, tempat pembuangan sampah yang seharusnya menjadi sarana terpenting dari penanggulangan sampah justru mengalami kemunduran dan pengurangan kuantitas. Jumlah bank sampah

yang ada pada tahun 2020 mencapai 36 unit turun menjadi 16 unit pada tahun 2021.

3. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik diartikan sebagai tanggapan dari suatu aktivitas atau kebijakan yang ada. Responsivitas sendiri merupakan kriteria yang penting karena bisa memuaskan dan merangkum kriteria lainnya, responsivitas penerapan Peraturan Daerah No.7 LD.2016/TLD.2016/NO.49 dengan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu seharusnya melibatkan peran serta masyarakat secara proposional, efektif dan efisien. Sementara pada kenyataannya, tingkat kepedulian lembaga dan masyarakat belum memperlihatkan kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang dibuktikan dengan tindak pembuangan sampah sembarangan dengan alasan keterlambatan akses mobil pengangkut dan kurangnya TPS serta TPA.

4. Ketetapan

Ketetapan dalam sebuah kebijakan berkenaan dengan sejauh mana efektivitas bisa memuaskan kebutuhan dan nilai dengan kriteria yang ditetapkan pada kuatnya hubungan kebijakan dengan hasil yang diharapkan. Ketetapan merujuk pada value atau tujuan dari program yang bersangkutan, dimana dalam hal ini yang diharapkan tentunya adalah ketepatan dari hasil (tujuan) yang diinginkan bisa berguna sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Daerah No.7 LD.2016/TLD.2016/NO.49 tentang Pengelolaan Sampah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sidenreng Rappang telah dilaksanakan akan tetapi tidak terealisasi secara maksimal. Program kebijakan tidak efektif atau tercapai karena kurangnya perhatian dan kontrol dari lembaga yang bersangkutan, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, TPS dan TPA yang kurang menyebabkan makin maraknya tindakan pembuangan sampah secara sembarangan, waktu operasional pembuangan sampah yang ditetapkan sering mengalami keterlambatan dan belum sepenuhnya dipatuhi oleh masyarakat, keberadaan bank sampah yang semakin kurang, serta kesadaran masyarakat

akan pengelolaan sampah yang masih sangat rendah.

E. REFERENSI

- P. (2017). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Danang Aji Kurniawan, A. S. (2020). Pengelolaan Sampah di Daerah Sepatan Kabupaten Tangerang. *ADIMAS*, 31-36.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Faturachman Alputra Sudirman, P. (2019). Tinjauan Implementasi Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan Sampah Kota Kendari. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 291-305.
- Gama Pratama, M. A. (2020). Upaya Modernisasi dan Inovasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Desa Leuwimunding Majalengka. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (ETOS)*, 37-49.
- LD.2016/TLD.2016/NO.49, P. D. (2016). Pengelolaan Sampah.
- Mike Dewanti, E. P. (2020). Analisis Efektivitas Bank Sampah Sebagai Alternatif Pengelolaan Sampah dalam Mencapai Smart City di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Ilmiah Adminitrasi Publik (JIAP)*, 21-29 .
- Miles, M. H. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. .* USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Muhammad Al Qamari, J. R. (2019). Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dalam Peningkatan Pendapatan pada Kelompok Ibu-Ibu Asyiyah. *PROKDIKMAS*, 48-54.

Muhtar Mochamad Solihin, P. M. (2019). Partisipasi Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Desa Ragajaya, Bojonggede - Bogor Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 388-398.

Nasional, S. I. (2021). <https://sipsn.menlhk.go.id>.

Wirandi, S. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN DESA TENTANG KAWASAN BEBAS MEROKOK (Studi Kasus Kawasan Tempat Umum Desa Carawali). *Jurnal Ilmiah Administrasi (JIA)*, 20-29
<http://jurnal.umsrappang.ac.id/jia/article/view/273>.